

PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAMONJENGI KECAMATAN MORI KABUPATEN MOROWALI UTARA

Oleh : Imanuel N. Tadanugi

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan kepala Desa Tamonjengi dalam pemberdayaan Masyarakat desa khususnya dalam pembangunan di Desa Tamonjengi kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara, sedangkan lokasi penelitian ini adalah di Desa Tamonjengi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif sedangkan jumlah responden yang di ambil adalah 19 Orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di Desa Tamonjengi dari peningkatan partisipasi, pembinaan dan koordinasi dapat terlaksana dengan baik, hal ini di sebabkan karena dilibatkannya semua unsur masyarakat Desa melakukan beberapa variable tersebut, Oleh karena itu peranan kepala desa sangatlah berpengaruh akan suksesnya pembangunan terutama dalam pemberdayaan masyarakat di desa itu, serta dukungan dari masyarakat harus benar-benar ada sehingga semua kegiatan-kegiatan pemerintahan desa dapat terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : *Peranan, Pemberdayaan, Pembangunan*

PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan paradigma pemberdayaan sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di desa, kelurahan, dan kecamatan. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokrasi, sedangkan pada tatanan

masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Proses pembangunan saat ini perlu memahami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari bawah (grassroots), memelihara keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia. Pembangunan yang dilakukan harus memuat proses pemberdayaan masyarakat yang mengandung makna dinamis untuk mengembangkan dalam mencapai tujuan. Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Kegagalan berbagai

program pembangunan perdesaan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat. Proses pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat.

Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.

Isu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada era globalisasi dan transparansi semakin banyak dibicarakan dalam forum-forum diskusi yang dilakukan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, nasional dan internasional, dan melalui artikel-artikel dalam media massa. Kesimpulannya mempersoalkan sikap apatis masyarakat terhadap proyek pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, penolakan masyarakat terhadap beberapa proyek pembangunan,

ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta pemecahan masalahnya, tingkat adopsi masyarakat yang rendah terhadap inovasi, dan masyarakat cenderung menggantungkan hidup terhadap bantuan pemerintah, serta kritik-kritik lainnya yang umumnya meragukan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk dilibatkan sebagai pelaksana pembangunan. Meskipun kritik-kritik diatas ada benarnya, tetapi dengan hanya menyalahkan masyarakat tanpa mencari faktor-faktor penyebabnya maka permasalahannya tidak dapat dipecahkan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Sasaran yang dituju adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Tamonjengi karena berdasarkan kenyataan masyarakat Desa Tamonjengi sebagian masyarakatnya masih berada dalam garis kemiskinan dan tingkat pendidikan yang cenderung masih rendah.

Dari pengamatan awal kurangnya peranan pemerintah terutama pemerintah Desa Tamonjengi kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara dalam memberdayakan masyarakat bidang pembangunan infrastruktur desa yaitu tidak berjalannya pemberdayaan masyarakat di desa tersebut akibat tidak dilibatkannya masyarakat dalam pembangunan desa, dimana yang mengerjakan proyek pembangunan di desa tersebut adalah pemborong yang berasal dari daerah lain, dan hal ini diperoleh dari hasil pra-penelitian dengan melakukan wawancara terhadap beberapa warga dilokasi penelitian. Sikap pemerintah desa yang acuh pada masyarakat dalam pembangunan desa akan

mematikan tradisi gotong-royong masyarakat desa dan menjadikan masyarakat merasa tidak ikut memiliki dalam pembangunan yang dilakukan sehingga kemungkinan pembangunan tersebut akan cepat rusak karena tidak ada rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan tersebut,

Berdasarkan uraian masalah tersebut maka penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara.

TEORI DAN KONSEP

Dalam pengertian Umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan juga merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang (Sedarmayanti, 2004: 33).

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan wacana yang sering dibicarakan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, hal ini tidak terlepas dari peran pemimpin desa sebagai orang yang dituakan di Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan,

menjadikan masyarakat yang swadaya, mandiri dan madani.

Kartasasmita (1997) menjelaskan, upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu,

perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan disegala bidang dan sektor kehidupan. Pihak lain menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, dan mengumpulkan sumberdaya (Eko, 2005)

Sutoyo Eko. Manifesto Pembaharuan Desa Dari Pembangunan Masyarakat ke Pemberdayaan Masyarakat. (APMD Press Yogyakarta, Yogyakarta)

Pemberdayaan juga menyatakan partisipasi yang lebih besar dalam proses pembangunan. Pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah objek penerima manfaat yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subjek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan dan kemampuan kultur dan politis. Berikut sejumlah indikator pemberdayaan:

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

2. Kemampuan membeli komoditas kecil: individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya.
3. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier.
4. Terlibat dalam membuat keputusan-keputusan rumah tangga.
5. Kebebasan relative dari dominasi keluarga.
6. Kesadaran hukum dan politik.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Otonomi daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Widjaja (2003 : 38) Sedangkan ciri-ciri desa yaitu :

- a. mata pencaharian penduduk relatif pada sektor pertanian.
- b. perbandingan antara lahan dan penduduk relatif besar yaitu dimana lahan yang luas dihuni oleh penduduk yang sedikit.
- c. Hubungan antara warga relatif akrab.
- d. Pada umumnya tradisi leluhur masih dipegang kuat.

Istilah masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, atau dengan istilah lain saling berinteraksi. Kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistim adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Masyarakat atau komunitas adalah menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal disuatu wilayah (dalam arti geografi) dengan batas-batas tertentu, dimana yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih dari besar dari anggota-anggotanya, dibandingkan dengan penduduk diluar batas wilayahnya (Soekanto, 2004:49).

Dalam bahasa Inggris masyarakat adalah *society* yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Istilah masyarakat disebut pula *sistim sosial*. Masyarakat juga adalah orang-orang yang hidup bersama dan mengasilkan kebudayaan. masyarakat bisa dikatakan suatu satuan atau kelompok orang-orang didalamnya melaksanakan hidup bersama-sama sehingga menghasilkan kebudayaan yang menjadi pengikat dalam kehidupan kelompoknya tersebut. Bayu Suryaningrat, (1979 :101)

Dalam pandangan para pelaksana pembangunan, wilayah pedesaan dianggap mampu apabila sarana dan prasarana dasar tersedia dan masyarakatnya memiliki

kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam kehidupan mereka, baik fisik maupun sosial-psikologis. Masyarakatnya secara umum memiliki tingkat pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti pangan, kesehatan dan gizi, pendidikan, perumahan dan lingkungan hidup atau dengan kata lain kuat dari segi ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan dan politik. Di dalam proses pengembangan desa terdapat dua unsur pokok, yaitu pihak yang mengembangkan dan yang dikembangkan. Sebagai sebuah proses perubahan sosial, pembangunan desa identik dengan pembangunan masyarakatserta pembangunan sarana dan prasarana dasar. Dalam konteks ini, masyarakat hendaknya dipahami sebagai setiap orang yang berada di luar sektor publik atau pemerintah yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam menciptakan kekuatan ekonomi di pedesaan.

Tanggapan Tjokroamidjojo (1996:18) Pembangunan merupakan suatu proses yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkesinambungan serta beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik. Dalam SK MENDAGRI No. 42/1969 berbunyi pembangunan desa/kelurahan adalah suatu pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintah yang terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus, sistematis dan terarah sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan Negara sebagai usaha menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Dasar penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian *survey*, yaitu mengadakan penyelidikan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan – keterangan secara faktual dengan tipe penelitian

deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran yang detail mengenai obyek yang diteliti yaitu analisis terhadap peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara.

Adapun dasar penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran fakta dan objek yang diteliti tentang peranan Camat dalam pemberdayaan masyarakat Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara.

Instrumen penelitian ini menggunakan pedoman wawancara yang diolah sehingga memperoleh hasil penelitian dalam memecahkan sebuah masalah sedangkan informasi penelitian bersumber dari pegawai kantor desa dan masyarakat Desa Tamonjengi sebagai berikut :

1. Kepala Desa	1 Orang
2. Sekretaris	1 Orang
3. Kepala Urusan/Kasi	6 Orang
4. Staf/masyarakat	11 Orang
Jumlah	19 Orang

Untuk obyektifnya data, maka yang menjadi informan kunci adalah Camat Mori Utara. Kabupaten Morowali Utara.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah teknik analisis data deskriptif, yaitu untuk menjelaskan secara detail mengenai kajian penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Sesuai judul diatas maka dalam hal ini lokasi penelitian adalah Kantor Desa Tamonjengi. Adapun yang menjadi obyek penelitian yakni pegawai dan Masyarakat Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Utara Kabupaten Poso.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil dan Pembahasan

Peranan diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan, tindakan yang dilakukan dalam suatu peristiwa. Peranan juga merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang terutama dalam aspek pelaksanaan pembangunan terutama dalam pemberdayaan masyarakat di Desa. Dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut tentunya peranan seorang pemimpin dalam hal ini kepala desa harus bisa menunjukan atau melakukan beberapa hal yang bisa mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa.

1. Peran Peningkatan Partisipasi

Partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan seseorang / masyarakat secara sukarela tanpa dipaksa dan keterlibatan secara spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kegiatan – kegiatan di dalam masyarakat. Partisipasi yang dimaksudkan disini adalah kesadaran masyarakat untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi sangat penting dalam pembangunan, karena pembangunan merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Partisipasi dalam konteks pembangunan di desa Tamonjengi mencakup keikutsertaan atau keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, dan dalam penerapan program yaitu adanya pembagian manfaat dari hasil pelaksanaan kegiatan serta keterlibatan warga dalam

mengevaluasi kegiatan – kegiatan pembangunan di desa Tamonjengi.

“...Dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di desa kami misalnya dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan masyarakat kami selalu di berikan kesempatan untuk berpartisipasi memberikan saran dan kritikan dalam setiap kegiatan penyusunan program pemerintah di desa kami sehingga saran dan usul tersebut bisa diterima dan di putuskan bersama melalui musyawah” (wawancara tanggal Oktober 2017)

Dari hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa peranan kepala desa dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan dalam pembangunan dapat terlaksana, hal ini di buktikan dengan diberinya kesempatan untuk berpartisipasi melalui pemberian masukan dan saran oleh masyarakat mengenai sebuah perencanaan program pemerintah desa.

2. Peran kepala desa dalam memberikan Pembinaan

Pemerintah desa merupakan pemimpin di desa yang berkedudukan sebagai koordinator yang menyelenggarakan pemerintahan di wilayahnya. Tugas kepala desa adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan desa lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan Seorang kepala desa.

Selain tugas pokok kades yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, kepala desa juga harus berperan aktif dalam membina dan mengarahkan seluruh masyarakatnya. menciptakan kondisi-kondisi dan perangsang-perangsang yang memotivasi masyarakatnya dalam mencapai tujuan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat di desa. Motivasi atau dorongan dapat berdampak pada

perilaku positif yang memberikan semangat kerja dan tentunya tercapainya tujuan secara maksimal. Motivasi yang sering ditunjukkan oleh kepala desa bukan hanya dengan sekedar memberi tahu kepada masyarakatnya tetapi adanya pembinaan melalui peningkatan ketrampilan dan pemanfaatan sumber daya masyarakat didesa.

Pendekatan dengan masyarakat desa adalah salah satu faktor penunjang terciptanya kondisi bekerja yang kondusif sebagai penuntun tercapainya hasil kerja yang maksimal. Masyarakat adalah seorang mitra kerja sekaligus sebagai orang yang membutuhkan tuntunan karena suatu hal terutama di bidang pembangunan desa di antaranya seorang pemimpin harus mampu dan pintar membaca dan memenuhi keinginan selama itu tidak melanggar dan sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil kerja.

Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menjaga kedekatan hubungan dengan orang disekitarnya sehingga menciptakan kondisi yang nyaman. Tenang, dan bersahabat. Di satu sisi, proses hubungan antara seorang kepala desa dan masyarakat tetap harus berada dalam koridor yang saling menghargai agar wibawa seorang kepala desa tetap terjaga, Menurut salah seorang masarakat desa Tamonjengi ber inisial TW mengatakan :

“...Kepala Desa Tamonjengi dalam melakukan pembinaan ketrampilan dan pemanfaatan sumber daya masyarakat di desa kami selalu dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan dan seminar-seminar tentang keterampilan pengelolaan hasil bumi di desa kami yaitu di baruga desa tamonjengi” (wawancara tanggal 7 Oktober 2017)

Dari hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa peranan kepala desa dalam hal melakukan pembinaan

masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan pemanfaatan sumberdaya masyarakat dalam pembangunan dapat terlaksana, hal ini di buktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan seminar dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan di Baruga Desa Tamonjengi sehingga pemberdayaan masyarakat desa dapat meningkat secara bertahap.

3. Peran Kepala Desa dalam Koordinasi dengan Masyarakat

Koordinasi sangatlah penting artinya dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan desa, sebab koordinasi mempunyai tujuan antara lain, supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam suatu pekerjaan. Begitu juga kepala desa dalam pemanfaatan sumberdaya masyarakat desa tidak bekerja sendiri, disamping itu dibantu oleh perangkatnya juga dibantu dan dilakukan bersama-sama serta unsur masyarakat lainnya. Dalam pelaksanaan koordinasi, apabila terdapat masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, kepala desa dapat mengetahui dan memberikan jalan keluar serta pemecahannya dalam batas kewenangannya, sehingga tujuan dari kegiatan-kegiatan maupun diskusi atau musyawarah desa dapat dilaksanakan melalui sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam kegiatan – kegiatan pembanguan di desa.

Sedangkan dalam bidang pemerintahan, kepala desa berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, keamanan, ketertiban umum dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas yang dimaksud. Kepala desa berkewajiban untuk melakukan koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan di Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Atas yang secara teknik administratif dijalankan oleh aparat-aparat desa dan perangkatnya.

Hal ini juga dapat terlihat dalam hasil wawancara dengan seorang tokoh masyarakat Desa Tamonjengi berinisial BB mengatakan :

“Bahwa kepala desa setiap 2 bulan melakukan rapat koordinasi yang dilaksanakan di baruga desa tentang masalah dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan pelayanan masyarakat supaya semua unit kerja dapat melaksanakan tugasnya sesuai tupoksinya dengan menjaga pelaksanaan pembangunan”.

Dari hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa peranan kepala desa dalam hal melakukan koordinasi kepada aparat dan lapisan masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan dapat berjalan dengan baik.

4. Peran Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan

Proses dalam sebuah perencanaan pembangunan desa dapat menjadi tujuan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan. Jika kepala desa dan masyarakat mempunyai taruhan/ pengorbanan dalam pembangunan dan aktif dalam pengambilan keputusan, mereka kemungkinan besar memberikan komitmen yang besar, sehingga mampu memenuhi tugas bersama. Partisipasi mengasumsikan bahwa masyarakat yang paling mengetahui masalah dan cara pemecahannya sesuai dengan rasionalitas mereka. Dengan pendekatan tersebut maka keputusan-keputusan yang diambil langsung akan menyentuh kepentingan mendesak untuk mereka tangani. Perencanaan yang dilakukan bersama dapat meningkatkan komitmen sehingga tujuan pembangunan menjadi optimal dan berkesinambungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa dalam perencanaan pembangunan masih dapat berjalan dengan baik dan masih sesuai dengan harapan

masyarakat desa Tamonjengi hal ini juga dapat dilihat melalui wawancara dengan salah seorang masyarakat desa berinisial WA mengatakan :

“...Dalam setiap perencanaan pembangunan desa kami kepala desa turut berperan aktif memberikan solusi dan masukan atas setiap adanya perbedaan pendapat di dalam masyarakat ketika pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan.” (wawancara Oktober 2017)

Hasil wawancara tersebut tadi menyimpulkan bahwa ada peran kepala desa dalam perencanaan pembangunan terbukti ketika adanya perbedaan pendapat kepala desa langsung menawarkan solusi serta saran agar perencanaan pembangunan tersusun sesuai dengan cita-cita masyarakat desa.

5. Peran Kepala Desa Mengajak Masyarakat Menjaga Hasil Pembangunan

Peranan Kepala Desa dalam mengajak masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan tentu sangatlah penting seperti membersihkan dan merawat gedung-gedung pemerintah desa dan menjaga kelestarian budaya.

Pelaksanaan pembangunan juga harus di dukung oleh masyarakat sehingga masyarakat ada rasa memiliki dan rasa kebersamaan dalam menjaga pembangunan desa, sehingga proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan berjalan sinergis. Faktor – Faktor yang mempengaruhi peranan kepala Desa Tamonjengi dalam pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sebagai mana diketahui bahwa dalam proses pemberdayaan masyarakat desa tidak hanya dilakukan oleh kepala dan pemerintah desa saja akan tetapi harus ada dukungan dari semua unsur masyarakat

desa, oleh karena itu hal-hal penting yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakatnya adalah melakukan pendekatan dan sosialisasi tentang bagaimana pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat di Desa.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Peranan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan Desa Tamonjengi, dapat terlaksana atau selalu dilakukan oleh kepala desa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dan saran kritikan terhadap pelaksanaan pembangunan di desa hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara dan tabel yang sudah di uraikan dalam pembahasan.
2. Peranan kepala desa dalam melakukan pembinaan masyarakat Desa Tamonjengi juga dapat terlaksana dengan baik melalui peningkatan ketrampilan dan sumber daya masyarakat desa dengan dilakukannya pelatihan atau seminar – seminar tentang pemanfaatan kekayaan alam dan ketrampilan masyarakat desa, hal ini dapat di buktikan dengan hasil wawancara dan tabel yang sudah tecantum di pembahasan.
3. Peranan kepala desa dalam melakukan koordinasi kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat juga dapat berjalan dengan baik melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan 2 bulan sekali tentang masalah dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan pelayanan masyarakat supaya semua unit kerja dapat melaksanakan tugasnya sesuai tupoksinya dengan menjaga pelaksanaan pembangunan hal ini dapat di lihat dari

hasil wawancara dan tabel dalam pembahasan.

SARAN

1. Dalam peningkatan partisipasi masyarakat kepala desa harus tetap memberikan kesempatan kepada seluruh tokoh-tokoh atau lapisan masyarakat untuk mengemukakan pendapat melalui pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan agar kesemuanya itu dukungan dari masyarakat tetap ada.
2. Kepala desa dalam perannya melakukan pembinaan harus lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat dapat lebih maju dan sejahtera sehingga membantu dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dan pemerintahan.
3. Pelaksanaan koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat harus tetap terjaga agar pelaksanaan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat bisa berjalan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Suryaningrat, 1979, *Desa dan Kelurahan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Abdurrachman, Oemi. 1990. *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Anggoro. 2002. *Teori dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Dedy Supriady Bratakusuma, Ph.D. Dadang Solihin, MA. 2002, *Otonomi*
- Koentjaraningrat, 1990, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Morissan. 2010. *Manajemen Public Relations*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mukarom, Zainal & Muhibudin Wijaya Laksana. 2015. *Manajemen Public Relations*, Bandung: Pustaka Setia.
- Narwoko & Bagong. 2007. *Sosiologi Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Friedman, John, *Pemberdayaan : Politik Alternatif Pemberdayaan Masyarakat*.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora
- Kartasasmita, Ginandjar, 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Makalah Disampaikan pada Sarasehan DPD Chambers, Robert. *Pembangunan Masyarakat*. New York: New York University Press, 1995.
- Moleong, L. J. 1992. *Metodologi Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya.
- Kartasasmita, Ginandjar, *Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Administrasi; Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Administrasi Pemangungan Universitas Brawijaya; Malang, 27 Mei 1995*.
- Widjaja, HAW., Prof. Drs., 2003, *Pemerintahan Desa / Marga*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : Mandar Maju.
- Soekanto, 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Rajawali
- Soedjono, Ir. 1985, *Pembinaan Ketahanan Masyarakat Desa*, Jakarta
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung
- Dokumen - Dokumen
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- . PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa.